

## ABSTRACT

The confiscated good management is one way of protecting the goods which will be used for verification. The task, authority and implementation of such management must be based on legislation that is specifically intended for it. Confiscated goods are obtained from forcible seizure of confiscation goods to protect the goods from undesirable things. Obviously, there are several inhibiting factors in the implementation. The purposes of this study are to determine how confiscated goods are managed and to know the obstacles in the implementation of these activities in the State Attorney, especially in Semarang State Attorney. The method which is used is sociological juridical with analytical descriptive specification, by describing analytically to the problems encountered, To get the results of interviews from the parties in question and regulations existed. Based on the result of the research, the confiscated goods management from corruption in Semarang State Attorney is managed by the Semarang State Attorney which is accordance with what is stated in the Act. This management process also works with the accordance the parties with what is stipulated by the Law and is based on court decisions. There are some factors which become the obstacle in managing the consificated goods, such as the material of the goods which are quickly destroyed, the lack of facilities, and sometimes the length of the process of mail for goods which will be auctioned.

**Keywords:** Management, Confiscated goods, Corruption

## ABSTRAK

Pengelolaan barang-barang sitaan korupsi merupakan salah satu acara melindungi barang-barang yang akan dipergunakan untuk pembuktian. Tugas, wewenang dan pelaksanaan dari pengelolaan tersebut harusnya memang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang memang khusus diperuntukkan untuk itu. Barang-barang sitaan didapat dari hasil upaya paksa yaitu penyitaan agar barang bukti terlindung dari perbutan yang tidak diinginkan. Tentunya ada beberapa faktor penghambat untuk pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana barang-barang sitaan tersebut dikelola dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di Kejaksaan Negeri khususnya di Kejaksaan Negeri Semarang. Metode yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, dengan menguraikan secara analitis terhadap permasalahan yang dihadapi, dengan hasil wawancara dari pihak-pihak yang bersangkutan maupun dengan peraturan-peraturan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang sitaan negara hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang dikelola oleh pihak Kejaksaan Negeri Semarang sesuai dengan apa yang tertera didalam Undang-undang. Proses pengelolaan ini juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Undang-undang dan didasarkan pada putusan pengadilan. Terdapat beberapa hambatan yaitu mengenai sifat barang yang cepat musnah, fasilitas yang masih kurang, dan terkadang lamanya pemrosesan surat untuk barang-barang yang harus dilelang.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Barang sitaan, Tindak Pidana Korupsi